



Pengaruh Infrastruktur, Sektor Pariwisata, Tenaga Kerja dan Pdrb Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi

Neli Mariana Manihuruk¹, Zulfanetti², Rosmeli³
Universitas Jambi¹, Universitas Jambi², Universitas Jambi³

*Corresponding author, email; Neli.manihuruk86@gmail.com_;

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2026

Revised Juni 2026

Accepted Juni 2026

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Regional Original Revenue, Road Infrastructure, Tourism, Labor, GRDP, Panel Data Regression.

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Neli Mariana Manihuruk, Zulfanetti, dan Rosmeli. "Pengaruh Infrastruktur, Sektor Pariwisata, Tenaga Kerja dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 19, no. 1 (2024)." *Journal of Sharia Economics* 7, No. 1 June: 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of road length, tourism visits, labor, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on Regional Original Revenue (PAD) of regencies/cities in Jambi Province during the 2015–2024 period. The data used are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of Jambi Province and related institutions. This study employs panel data regression analysis using the Fixed Effect Model (FEM) approach. Model selection was conducted through the Chow Test and Hausman Test, which indicated that FEM was the most appropriate model for this study. The results show that simultaneously, road length, tourism visits, labor, and GRDP significantly affect PAD in regencies/cities of Jambi Province. Partially, labor and GRDP have a positive and significant effect on PAD, while road length and tourism visits do not have a significant effect on PAD. The labor variable has a coefficient of 166,489.08 with a probability value of 0.0268, while the GRDP variable has a coefficient of 0.0048 with a probability value of 0.0014. Meanwhile, road length and tourism visits have probability values of 0.8165 and 0.6655 respectively, which are higher than the 5 percent significance level. The Adjusted R-Squared value of 0.926 indicates that the independent variables explain 92.6 percent of the variation in PAD. The findings indicate that regional economic activity and labor absorption are the main factors influencing the increase of PAD in Jambi Province. Therefore, local governments need to encourage productive economic growth, improve labor quality, optimize investment, and strengthen regional fiscal governance in order to enhance sustainable regional financial independence.

2026 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

A. Pendahuluan

Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan keuangan daerah. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya guna membiayai pembangunan secara mandiri serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator utama dalam menilai tingkat kemandirian fiskal karena mencerminkan

kemampuan daerah menggali sumber-sumber penerimaan dari potensi ekonomi lokal.¹

Meskipun desentralisasi fiskal telah berlangsung lebih dari dua dekade, kapasitas fiskal daerah di Indonesia masih relatif rendah. Pada tahun 2024, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah secara nasional hanya mencapai sekitar 8,31 persen atau sebesar Rp232,99 triliun, yang menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.² Kondisi tersebut juga terjadi di Provinsi Jambi yang menempati peringkat ketujuh dari sepuluh provinsi utama di Sumatera berdasarkan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, sehingga menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang relatif rendah dibandingkan provinsi lainnya di kawasan tersebut.³

Data PAD kabupaten/kota di Provinsi Jambi menunjukkan adanya disparitas yang cukup besar antarwilayah. Kota Jambi menjadi daerah dengan PAD tertinggi sebesar Rp455,25 miliar pada tahun 2024, sedangkan Kabupaten Kerinci hanya sebesar Rp47,55 miliar. Di sisi lain, total PAD Provinsi Jambi meningkat dari Rp1,84 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp2,16 triliun pada tahun 2022, namun kembali menurun menjadi Rp2,09 triliun pada tahun 2023 dan 2024. Fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah belum berkembang secara stabil dan berkelanjutan.⁴

Secara teoritis, peningkatan PAD dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi daerah. Infrastruktur jalan berperan penting dalam memperlancar mobilitas barang, jasa, dan masyarakat sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi dan memperluas basis penerimaan daerah.⁵ Di Provinsi Jambi, panjang jalan meningkat dari 13.141 km pada tahun 2021 menjadi 13.200 km pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas wilayah.⁶ Selain infrastruktur, sektor pariwisata juga berkontribusi terhadap PAD melalui penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi objek wisata. Jumlah wisatawan di Provinsi Jambi meningkat signifikan dari 1,39 juta kunjungan pada tahun 2021 menjadi 4,59 juta kunjungan pada tahun 2024, yang menunjukkan potensi besar sektor ini dalam mendukung penerimaan daerah.⁷

Faktor lain yang turut memengaruhi PAD adalah tenaga kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut teori modal manusia, peningkatan

¹ Hamidi et al., "Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal Di Indonesia Editor."

² BPS, *Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan [Rincian 2022] (Rupiah), 2024.*

³ Kemnkeu, "Data APBD Dan Transfer Ke Daerah."

⁴ Kemenkeu, "Portal Data APBD."

⁵ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi.*

⁶ BPS Provinsi Jambi, "Provinsi Jambi Dalam Angka 2025."

⁷ BPS Provinsi Jambi.

jumlah dan kualitas tenaga kerja akan mendorong produktivitas serta aktivitas ekonomi daerah.⁸ Data menunjukkan jumlah tenaga kerja di Provinsi Jambi meningkat dari 1,75 juta orang pada tahun 2021 menjadi 1,83 juta orang pada tahun 2024.⁹ Sementara itu, PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah juga menunjukkan tren meningkat selama periode penelitian. Peningkatan output ekonomi tersebut berpotensi memperluas basis pajak dan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan PAD.¹⁰

Sejumlah penelitian terdahulu menemukan bahwa infrastruktur, pariwisata, tenaga kerja, dan PDRB memiliki pengaruh terhadap PAD. Namun, sebagian besar penelitian masih mengkaji variabel-variabel tersebut secara parsial dan menggunakan pendekatan time series atau cross section sehingga belum mampu menjelaskan variasi antarwilayah dan perubahan antarwaktu secara simultan. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengintegrasikan keempat variabel tersebut dalam konteks kabupaten/kota di Provinsi Jambi masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui penggunaan data panel kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2015–2024 dengan mengintegrasikan variabel infrastruktur jalan, sektor pariwisata, tenaga kerja, dan PDRB dalam satu model empiris. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif karena mampu menangkap perbedaan karakteristik antarwilayah sekaligus dinamika perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh infrastruktur jalan, sektor pariwisata, tenaga kerja, dan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi

B. Landasan Teori

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan. Implementasi otonomi daerah di Indonesia diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.¹¹ Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah didukung oleh kebijakan desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan serta membiayai kebutuhan pembangunan sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

⁸ Becker, *Human Capital*.

⁹ BPS, *KetenagaKerjaan Provinsi, 2024*.

¹⁰ Todaro and Smith, *Economic Development (13th Ed.)*.

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.

2. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan secara mandiri. Menurut Sarundajang, desentralisasi mencakup pelimpahan kewenangan legislatif, administratif, maupun yudikatif dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah¹². Kebijakan ini berbeda dengan dekonsentrasi karena pada desentralisasi tanggung jawab juga ikut dialihkan kepada pemerintah daerah.

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan harus diikuti dengan pengalihan pembiayaan, sarana, serta sumber daya manusia¹³. Kebijakan otonomi daerah lahir sebagai bagian dari reformasi untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Mardiasmo menjelaskan bahwa dominasi pemerintah pusat pada masa sebelumnya menyebabkan daerah hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, bukan pada pelayanan masyarakat¹⁴.

Dalam perspektif teori federalisme fiskal, Oates menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat lokal sehingga alokasi sumber daya akan lebih efisien apabila sebagian kewenangan fiskal diserahkan kepada daerah¹⁵. Konsep ini dikenal sebagai *Decentralization Theorem*. Selain meningkatkan efisiensi, desentralisasi fiskal juga mendorong akuntabilitas dan kompetisi antar daerah dalam meningkatkan pelayanan publik¹⁶.

Di Indonesia, penguatan desentralisasi fiskal terus berkembang hingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Regulasi ini menitikberatkan pada penguatan pajak daerah, pengurangan ketimpangan fiskal, peningkatan kualitas belanja, dan harmonisasi kebijakan pusat-daerah¹⁷. Dengan demikian, desentralisasi fiskal tidak hanya bertujuan memperluas otonomi daerah, tetapi juga meningkatkan efisiensi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional.

¹² Sarundajang, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*.

¹⁴ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*.

¹⁵ Hanif, Wallace, and Gago-de-Santos, "Economic Growth by Means of Fiscal Decentralization: An Empirical Study for Federal Developing Countries."

¹⁶ Qian and Roland, "Federalism and the Soft Budget Constraint."

¹⁷ Lewis, "Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment."

3. Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah menjadi instrumen utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah secara mandiri¹⁸. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian fiskal daerah. Struktur keuangan daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)¹⁹.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintahan selama satu tahun anggaran. APBD berfungsi sebagai instrumen perencanaan, pengendalian, alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, serta stabilisasi perekonomian daerah.²⁰ Struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan pembangunan serta kemampuan fiskal daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya untuk penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi daerah. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan APBD sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.²¹

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah²². Dalam perspektif desentralisasi fiskal, PAD menjadi indikator utama kemandirian fiskal karena menunjukkan kemampuan pemerintah

¹⁸ Halim, *Akuntansi Sektor Publik "Akuntansi Keuangan Daerah"*.

¹⁹ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*.

²⁰ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*.

²¹ Halim, *Akuntansi Sektor Publik "Akuntansi Keuangan Daerah"*.

²² Halim.

daerah membiayai pengeluaran tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat.

Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Oleh karena itu, optimalisasi sumber-sumber PAD menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan berkelanjutan²³.

6. Infrastruktur Jalan dan Pendapatan Asli Daerah

Infrastruktur merupakan fasilitas fisik yang berfungsi mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Salah satu bentuk infrastruktur yang memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah adalah infrastruktur jalan. Menurut Sjafrizal, jalan berfungsi memperlancar mobilitas barang, jasa, tenaga kerja, dan informasi sehingga mampu meningkatkan efisiensi ekonomi serta memperkuat konektivitas antarwilayah²⁴.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dipandang sebagai modal publik (*public capital*) yang mampu meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi. Ketersediaan jalan yang memadai dapat menurunkan biaya distribusi, memperluas akses pasar, dan mendorong berkembangnya kegiatan perdagangan maupun investasi. Kondisi tersebut pada akhirnya akan memperbesar basis pajak dan retribusi daerah sehingga berpotensi meningkatkan PAD²⁵.

7. Sektor Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah

Pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk tujuan rekreasi, pendidikan, maupun kepentingan lainnya dalam jangka waktu tertentu.²⁶ Dalam perspektif ekonomi regional, sektor pariwisata termasuk sektor basis yang mampu menarik aliran pendapatan dari luar daerah melalui pengeluaran wisatawan.

Menurut Song dan Witt, peningkatan aktivitas pariwisata menghasilkan multiplier effect terhadap sektor transportasi, perdagangan, perhotelan, restoran, dan jasa lainnya. Dampak tersebut berkontribusi pada peningkatan penerimaan pemerintah daerah melalui pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, serta retribusi objek wisata. Oleh karena itu, perkembangan sektor pariwisata diperkirakan berperan dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan PAD²⁷.

²³ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*.

²⁴ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*.

²⁵ Gultom and Tini, "Pembangunan Infrastruktur Dalam Islam: Tinjauan Ekonomi Dan Sosial."

²⁶ Pedit, *Ilmu Pariwisata : Sebuah Pengantar Perdana*.

²⁷ Song and Witt, *Tourism Economics and Policy (2nd Ed.)*.

8. Tenaga Kerja dan Pendapatan Asli Daerah

Tenaga kerja merupakan seluruh penduduk usia kerja yang mampu dan bersedia melakukan kegiatan ekonomi. Menurut International Labour Organization (ILO), tenaga kerja mencakup penduduk yang bekerja, mencari pekerjaan, maupun siap bekerja²⁸. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik menetapkan tenaga kerja sebagai penduduk berusia 15 tahun ke atas²⁹.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja merupakan faktor produksi utama bersama modal dan teknologi. Becker menjelaskan bahwa kualitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, dan kesehatan sebagai bentuk investasi human capital³⁰. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja, semakin tinggi pula produktivitas ekonomi.

Teori Keynes juga menekankan bahwa penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh permintaan agregat. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, permintaan tenaga kerja juga meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi³¹. Oleh karena itu, tenaga kerja menjadi salah satu variabel penting dalam analisis pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam teori ekonomi klasik, tenaga kerja merupakan faktor produksi utama yang menentukan tingkat output dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah³². Sementara itu, teori modal manusia (*human capital theory*) menegaskan bahwa kualitas tenaga kerja berpengaruh terhadap produktivitas dan kapasitas ekonomi daerah³³.

Peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan produktif akan meningkatkan pendapatan masyarakat, konsumsi, serta aktivitas usaha. Perkembangan tersebut berpotensi memperluas basis penerimaan daerah melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, tenaga kerja memiliki hubungan tidak langsung dengan peningkatan PAD melalui penguatan aktivitas ekonomi daerah.

9. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah selama

²⁸ Handari and Isnandar, "Indikator Pasar Tenaga Kerja Di Indonesia Berdasarkan Kerangka Key Indicators of the Labour Market (KILM)."

²⁹ BPS, *KetenagaKerjaan Provinsi, 2024*.

³⁰ Baye and Kreitner, *The Economics of Human Capital in the Knowledge Economy*.

³¹ Mankiw, *Macroeconomics*.

³² Jhingan, *The Economics of Development and Planning*.

³³ Becker, *Human Capital*.

periode tertentu³⁴. PDRB digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dan kapasitas produksi daerah.

Menurut teori pertumbuhan ekonomi Solow, peningkatan output ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi.³⁵ Daerah dengan nilai PDRB yang tinggi umumnya memiliki aktivitas ekonomi yang lebih besar sehingga mampu menciptakan basis pajak yang lebih luas. Meningkatnya produksi, perdagangan, konsumsi, dan investasi akan meningkatkan penerimaan pemerintah daerah dari berbagai sumber PAD. Oleh karena itu, PDRB dipandang sebagai salah satu determinan penting dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah.³⁶

C. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk data panel yang merupakan kombinasi antara data time series dan cross section. Data mencakup 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2015–2024. Variabel yang digunakan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen, serta panjang jalan, jumlah kunjungan wisatawan, jumlah penduduk bekerja, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel independen. Data diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Portal APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jambi, serta Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.

Analisis data dilakukan dalam dua tahap. Pertama, analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan PAD, panjang jalan, kunjungan wisatawan, jumlah penduduk bekerja, dan PDRB selama periode penelitian. Kedua, analisis regresi data panel digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap PAD. Model regresi yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

$$PAD_{it} = \beta_0 + \beta_1 INF_{it} + \beta_2 WIS_{it} + \beta_3 TK_{it} + \beta_4 PDRB_{it} + \varepsilon_{it}$$

Pemilihan model panel dilakukan melalui Uji Chow untuk menentukan *model Common Effect atau Fixed Effect*, serta Uji Hausman untuk memilih antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*.³⁷ Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis menggunakan Uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan dan Uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial. Kemampuan model dalam menjelaskan variasi PAD diukur menggunakan koefisien determinasi (*Adjusted R²*).

³⁴ BPS, "STATISTIK INDONESIA 2024."

³⁵ Todaro and Smith, *Economic Development (13th Ed.)*.

³⁶ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*.

³⁷ Gujarati and Porter, *Basic Econometrics*.

Untuk memastikan validitas model, dilakukan pula pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.³⁸

D. Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki luas wilayah sekitar 50.070,05 km² dan terdiri atas 9 kabupaten serta 2 kota. Secara geografis, Provinsi Jambi memiliki posisi yang strategis karena didukung oleh sumber daya alam yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Kabupaten Merangin merupakan wilayah terluas, sedangkan Kota Jambi memiliki luas wilayah terkecil namun menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi daerah.³⁹

Kondisi demografi Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang positif. Jumlah penduduk meningkat dari 3,54 juta jiwa pada tahun 2020 menjadi 3,72 juta jiwa pada tahun 2024. Peningkatan jumlah penduduk tersebut diikuti oleh membaiknya kondisi ketenagakerjaan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja dan penduduk bekerja serta menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Kondisi ini mencerminkan semakin meningkatnya kapasitas sumber daya manusia sebagai faktor pendukung pembangunan ekonomi daerah.⁴⁰

Dari sisi ekonomi, Provinsi Jambi menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil selama periode 2020–2024. Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat dan mencapai 4,51 persen pada tahun 2024. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku juga terus meningkat dari Rp205,08 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp323,17 triliun pada tahun 2024. Struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang diikuti oleh sektor perdagangan, industri pengolahan, serta pertambangan dan penggalian⁴¹.

Selain itu, sektor pariwisata dan infrastruktur jalan turut menunjukkan perkembangan yang mendukung aktivitas ekonomi daerah. Aktivitas pariwisata mengalami pemulihan yang ditandai dengan meningkatnya tingkat hunian hotel dan jumlah kamar terjual. Sementara itu, panjang jalan di Provinsi Jambi relatif stabil dengan total lebih dari 13 ribu kilometer yang sebagian besar merupakan jalan kabupaten/kota. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur dan sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas ekonomi serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/kota Provinsi Jambi.⁴²

³⁸ Gujarati and Porter.

³⁹ BPS Provinsi Jambi, "Provinsi Jambi Dalam Angka 2025."

⁴⁰ BPS Provinsi Jambi.

⁴¹ BPS, "Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi (Miliar Rupiah)."

⁴² BPS, "Statistik Daerah Provinsi Jambi 2024."

E. Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Variabel Penelitian

Pada periode 2015–2024, perkembangan indikator ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi menunjukkan kecenderungan yang positif meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa variabel. Dari sisi kemandirian fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi meningkat dari Rp1,24 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp2,09 triliun pada tahun 2024 dengan rata-rata Rp1,71 triliun, meskipun sempat mengalami penurunan pada masa pandemi tahun 2020. Kota Jambi menjadi daerah dengan rata-rata PAD tertinggi sebesar Rp376,21 miliar, sedangkan Kota Sungai Penuh memiliki rata-rata terendah sebesar Rp46,42 miliar. Pada aspek infrastruktur, panjang jalan dalam kondisi baik di Provinsi Jambi relatif stabil dengan rata-rata 11.869,9 km selama periode pengamatan. Kabupaten Tebo memiliki rata-rata panjang jalan tertinggi sebesar 1.686,8 km, sedangkan Kota Sungai Penuh terendah sebesar 256,1 km. Dari sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan dari 2,58 juta kunjungan pada tahun 2015 menjadi 4,59 juta kunjungan pada tahun 2024 dengan rata-rata 2,41 juta kunjungan per tahun.⁴³

Kota Jambi menjadi tujuan wisata utama dengan rata-rata 734.547 kunjungan, sementara Tanjung Jabung Timur mencatat rata-rata kunjungan terendah sebesar 27.752 kunjungan. Selanjutnya, jumlah penduduk bekerja di Provinsi Jambi meningkat dari 1,45 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi 1,83 juta jiwa pada tahun 2024 dengan rata-rata 1,58 juta jiwa. Kota Jambi memiliki rata-rata tenaga kerja tertinggi sebanyak 265.946 jiwa, sedangkan Kota Sungai Penuh terendah sebanyak 42.153 jiwa.⁴⁴

Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi meningkat dari Rp124,50 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp177,24 triliun pada tahun 2024 dengan rata-rata Rp148,56 triliun. Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi daerah dengan rata-rata PDRB tertinggi sebesar Rp30,02 triliun, sedangkan Kota Sungai Penuh terendah sebesar Rp4,59 triliun. Temuan ini menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat, infrastruktur yang memadai, aktivitas pariwisata yang tinggi, dan penyerapan tenaga kerja yang besar cenderung memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi, sebagaimana tercermin dari nilai PDRB yang relatif lebih besar, sehingga mendukung teori bahwa pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pariwisata, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.⁴⁵

⁴³ BPS Provinsi Jambi, "Provinsi Jambi Dalam Angka 2025."

⁴⁴ BPS, "Statistik-Hotel-Dan-Akomodasi-Lainnya-Provinsi-Jambi-2024."

⁴⁵ BPS, "Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi (Miliar Rupiah)."

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan estimasi regresi data panel, dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan model yang digunakan menghasilkan estimasi yang valid. Pengujian meliputi uji autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Menurut Sugiyono, pengujian tersebut merupakan asumsi yang umum digunakan dalam regresi data panel untuk memperoleh estimator yang konsisten dan efisien⁴⁶.

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat matriks korelasi antarvariabel independen. Hasil pengujian menunjukkan seluruh nilai korelasi berada di bawah batas kritis 0,85.

Tabel.1. Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000	-0.259	0.098	0.284
X2	-0.259	1.000	0.492	0.087
X3	0.098	0.492	1.000	0.390
X4	0.284	0.087	0.390	1.000

Sumber: Data diolah menggunakan EViews

Nilai korelasi tertinggi sebesar **0,492** terjadi antara sektor pariwisata dan tenaga kerja, namun masih berada di bawah ambang batas 0,85. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah multikolinearitas⁴⁷.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Glejser dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil pengujian disajikan pada Tabel berikut.

Tabel. 2. Uji Heterokedastitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	71917129443	41329252692	1.740102343	0.085079361
INFRA	28068458.9	33863359.42	0.828874021	0.409253416
PAR	20187.2185	6388.237488	3.160060743	0.062116309
TK	46380.76082	34448.60022	1.346375775	0.181385065
PDRB	0.002457104	0.000679303	3.617097843	0.060479475

Sumber: Data diolah menggunakan EViews

Seluruh variabel independen memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas sehingga asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi⁴⁸.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.*

⁴⁷ Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS.*

⁴⁸ Ghozali.

3. Hasil Estimasi Model

Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman, model yang terpilih dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM) karena mampu mengakomodasi perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang bersifat tetap selama periode penelitian⁴⁹. Hasil estimasi model disajikan pada Tabel berikut. Hasil estimasi Fixed Effect Model disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	47366916120.50010	88790489233.43300	0.53347	0.59496
INFRA	-16929330.21816	72750994.84814	-0.23270	0.81649
PAR	-5951.67815	13724.29199	-0.43366	0.66552
TK	166489.07875	74008.30810	2.24960	0.02678
PDRB	0.00480	0.00146	3.28792	0.00142

Sumber: Data diolah menggunakan EViews.

Model regresi yang diperoleh adalah:

$$\text{PAD} = 47.366.916.120 - 16.929.330(\text{INFRA}) - 5.951,68(\text{PAR}) + 166.489,08(\text{TK}) + 0,0048(\text{PDRB})$$

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja (TK) dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Koefisien tenaga kerja sebesar 166.489,08 mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan PAD, sedangkan koefisien PDRB sebesar 0,0048 menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah turut mendorong peningkatan PAD. Di sisi lain, variabel infrastruktur jalan dan pariwisata memiliki koefisien negatif, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode penelitian lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dibandingkan pembangunan infrastruktur jalan maupun peningkatan jumlah wisatawan.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji F)

⁴⁹ Gujarati and Porter, *Basic Econometrics*.

Hasil estimasi *Fixed Effect Model* menunjukkan nilai F-statistic sebesar 98,318 dengan Prob(F-statistic) sebesar 0,0000 ($< 0,05$). Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel infrastruktur jalan, pariwisata, tenaga kerja, dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Dengan demikian, model yang digunakan layak untuk menjelaskan variasi PAD selama periode penelitian.

Tabel 4. Hasil Uji F

F-statistic	Prob(F-statistic)	Keterangan
98,318	0,0000	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan EViews.

b. Uji Parsial (Uji t)

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, masing-masing dengan nilai probabilitas sebesar 0,0268 dan 0,0014. Sementara itu, variabel infrastruktur jalan dan pariwisata tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD karena memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lebih berperan dalam meningkatkan PAD dibandingkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kunjungan wisatawan selama periode penelitian.

Tabel 6. Hasil Uji t

Variabel	Koefisien	Probabilitas	Keterangan
INFRA	-16.929.330,22	0,8165	Tidak Signifikan
PAR	-5.951,68	0,6655	Tidak Signifikan
TK	166.489,08	0,0268	Signifikan
PDRB	0,0048	0,0014	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan EViews.

c. Koefisien Determinasi

Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,926 menunjukkan bahwa variasi PAD kabupaten/kota di Provinsi Jambi dapat dijelaskan oleh variabel infrastruktur jalan, pariwisata, tenaga kerja, dan PDRB sebesar 92,6%, sedangkan sisanya 7,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang sangat baik.

5. Analisis dan Pembahasan

a. Pengaruh Infrastruktur Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan *model Fixed Effect*, variabel panjang jalan (X_1) memiliki nilai koefisien sebesar -17.298.031.43, nilai t-statistic sebesar -0.2378, dan nilai probabilitas sebesar 0.8125. Nilai

probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha = 0.05$), sehingga H_0 gagal ditolak dan H_1 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa panjang jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2015–2024. Secara statistik, hasil ini menunjukkan bahwa perubahan panjang jalan belum mampu menjelaskan variasi PAD secara signifikan dalam model penelitian.

Secara ekonomis, koefisien regresi yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa setiap peningkatan panjang jalan sebesar satu kilometer cenderung diikuti penurunan PAD sebesar Rp17.298.031.43, dengan asumsi variabel lain konstan (*ceteris paribus*). Namun demikian, karena hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik, maka arah hubungan negatif tersebut belum dapat diinterpretasikan sebagai hubungan kausal ekonomi yang kuat. Temuan ini mengindikasikan bahwa penambahan infrastruktur jalan belum secara langsung mampu mendorong peningkatan penerimaan asli daerah.

Secara teoritis, hasil ini memberikan perspektif yang menarik terhadap teori pertumbuhan ekonomi endogen yang dikembangkan oleh Paul Romer, yang menjelaskan bahwa infrastruktur publik merupakan salah satu bentuk modal publik (*public capital*) yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi jangka panjang. Selain itu⁵⁰, teori pembangunan infrastruktur yang dikembangkan oleh Albert O. Hirschman menekankan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi menciptakan *forward linkage dan backward linkage* dalam perekonomian daerah. Namun, teori tersebut juga menegaskan bahwa dampak ekonomi infrastruktur tidak selalu bersifat langsung, melainkan membutuhkan waktu, kualitas institusi, dan dukungan sektor produktif agar dapat menghasilkan efek fiskal.⁵¹

Dalam konteks empiris kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2015–2024, hasil ini cukup relevan dengan kondisi struktur ekonomi daerah yang masih didominasi oleh sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Pada banyak daerah, pembangunan jalan lebih diarahkan untuk membuka akses wilayah, meningkatkan konektivitas antar kecamatan, dan mendukung distribusi komoditas, bukan secara langsung untuk meningkatkan basis pajak daerah. Selain itu, sebagian besar infrastruktur jalan daerah juga bersifat pelayanan publik sehingga manfaat fiskalnya lebih bersifat tidak langsung melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian hutauruk, yang menemukan bahwa infrastruktur jalan dalam jangka tertentu dapat menunjukkan pengaruh negatif terhadap indikator ekonomi karena membutuhkan biaya investasi dan

⁵⁰ Mankiw, Romer, and Weil, "A Contribution to the Empirics of Economic Growth."

⁵¹ Pineda-Mora et al., "Emerging Water Quality Issues along Rio de La Sabana, Mexico."

pemeliharaan yang besar sebelum menghasilkan manfaat ekonomi optimal.⁵² Temuan ini juga didukung oleh penelitian dari Raditya Yudhan Kustanto dan Benedictus Raksaka Mahi. yang menunjukkan bahwa infrastruktur jalan lebih berpengaruh terhadap mobilitas ekonomi lokal dibandingkan langsung terhadap indikator fiskal daerah.⁵³ Penelitian lain oleh Siti Humayro Muharromah juga menunjukkan bahwa panjang jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada data panel provinsi di Indonesia⁵⁴.

Namun demikian, hasil ini berbeda dengan penelitian Paul Gertler dkk, yang menemukan bahwa perbaikan kualitas jalan di Indonesia mampu meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, pendapatan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan hasil tersebut kemungkinan disebabkan oleh perbedaan indikator infrastruktur yang digunakan. Penelitian ini menggunakan indikator kuantitas berupa panjang jalan, sedangkan penelitian sebelumnya lebih menekankan kualitas jalan, aksesibilitas, dan efisiensi transportasi⁵⁵.

Secara kritis, tidak signifikannya pengaruh panjang jalan terhadap PAD juga dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, peningkatan panjang jalan belum tentu diikuti peningkatan kualitas jalan. Kedua, distribusi infrastruktur antarwilayah belum sepenuhnya terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Ketiga, manfaat ekonomi jalan cenderung bersifat *lagging effect*. yaitu baru terasa dalam jangka menengah dan panjang. Selain itu, PAD lebih banyak dipengaruhi oleh sektor perpajakan, perdagangan, jasa, dan aktivitas investasi dibandingkan sekadar penambahan infrastruktur fisik.

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Jambi tidak cukup hanya berfokus pada penambahan panjang jalan, tetapi juga perlu meningkatkan kualitas infrastruktur, konektivitas antar sentra ekonomi, serta integrasi jalan dengan kawasan industri, perdagangan, pariwisata, dan pusat produksi masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur jalan perlu disertai dengan kebijakan hilirisasi ekonomi daerah agar investasi infrastruktur dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

b. Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model*, variabel jumlah wisatawan (X_2) yang merepresentasikan sektor

⁵² Hutaeruk, "Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Pematangsiantar."

⁵³ Hadi and Mahi, "Peran Dana Alokasi Khusus Fisik Afiriasi Terhadap Pembangunan Pendidikan Daerah Tertinggal Di Indonesia."

⁵⁴ Raliyah, "Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Provinsi Jambi."

⁵⁵ Gertler et al., "Road Maintenance and Local Economic Development: Evidence from Indonesia's Highways."

pariwisata memiliki nilai koefisien sebesar -5.953.09, nilai t-statistic sebesar -0.4338, dan nilai probabilitas sebesar 0.6654, Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha = 0.05$), sehingga H_0 gagal ditolak dan H_1 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2015–2024. Secara statistik, hasil ini menunjukkan bahwa perubahan jumlah kunjungan wisatawan belum mampu menjelaskan perubahan PAD secara signifikan dalam model penelitian.

Secara ekonomis, nilai koefisien yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa setiap peningkatan jumlah wisatawan sebesar satu orang cenderung diikuti penurunan PAD sebesar Rp5.953.00, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (*ceteris paribus*). Namun karena hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. maka arah hubungan negatif tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pengaruh ekonomi yang kuat. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di kabupaten/kota Provinsi Jambi belum secara otomatis mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Secara teoritis, hasil ini memberikan perspektif yang menarik terhadap teori *Tourism-Led Growth Hypothesis* (TLGH), yang menjelaskan bahwa sektor pariwisata dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penerimaan pajak daerah. Selain itu, teori pengeluaran publik dari Richard Musgrave menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi daerah, termasuk sektor pariwisata, dapat memperluas basis penerimaan pemerintah apabila mampu dikonversi menjadi objek pajak dan retribusi daerah. Namun, teori tersebut juga menekankan bahwa kontribusi ekonomi sektor pariwisata sangat dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola. kualitas destinasi. dan integrasi sektor pendukung⁵⁶.

Dalam konteks empiris kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2015–2024. hasil ini cukup relevan dengan karakteristik sektor pariwisata daerah yang masih didominasi wisata domestik, wisata berbasis alam, dan aktivitas kunjungan lokal dengan tingkat tourist spending yang relatif rendah. Meskipun beberapa daerah seperti Kerinci, Kota Jambi, dan Merangin menunjukkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. peningkatan tersebut belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi peningkatan PAD melalui pajak hotel, restoran, hiburan, maupun retribusi objek wisata. Selain itu, pada periode 2020–2021 sektor pariwisata juga mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19 yang menurunkan mobilitas wisatawan secara signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Wirawan dan Hasanah

⁵⁶ Fletcher, "Input-Output Analysis and Tourism Impact Studies."

yang menemukan bahwa beberapa indikator sektor pariwisata tidak selalu memberikan pengaruh langsung terhadap PAD apabila belum didukung ekosistem bisnis wisata yang kuat.⁵⁷ Temuan ini juga konsisten dengan penelitian pada wilayah pariwisata di Indonesia yang menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan belum tentu meningkatkan PAD apabila kontribusi fiskalnya belum optimal. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan studi Khairina dkk, yang menemukan bahwa sektor pariwisata memiliki hubungan positif terhadap PAD pada daerah destinasi wisata prioritas nasional. Penelitian lain di Daerah Istimewa Yogyakarta juga menunjukkan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap PAD melalui aktivitas ekonomi pariwisata yang lebih terintegrasi.⁵⁸

Perbedaan hasil tersebut dapat dijelaskan oleh karakteristik ekonomi daerah yang berbeda. Daerah seperti Bali, Yogyakarta, atau DKI Jakarta memiliki ekosistem pariwisata yang lebih matang, didukung infrastruktur, akomodasi, transportasi, serta sistem pemungutan pajak sektor wisata yang lebih optimal. Sementara itu, di Provinsi Jambi, sebagian besar destinasi wisata masih berada pada tahap pengembangan, promosi belum maksimal, dan keterkaitan antara aktivitas wisata dengan penerimaan fiskal daerah belum sepenuhnya terbentuk.

Secara kritis, tidak signifikannya pengaruh jumlah wisatawan terhadap PAD juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, tingginya jumlah wisatawan belum tentu diikuti tingginya pengeluaran wisatawan (*tourist expenditure*). Kedua, masih banyak aktivitas ekonomi wisata yang belum masuk dalam sistem perpajakan formal. Ketiga, sebagian destinasi wisata dikelola oleh masyarakat atau sektor informal sehingga kontribusinya terhadap PAD relatif kecil. Selain itu, lemahnya integrasi antara sektor pariwisata dengan industri pendukung seperti hotel, restoran, dan transportasi lokal juga dapat mengurangi dampak fiskalnya.

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Jambi perlu mengubah orientasi pembangunan pariwisata dari sekadar peningkatan jumlah kunjungan menjadi peningkatan *quality of tourism spending*. Strategi yang dapat dilakukan antara lain penguatan destinasi unggulan, peningkatan kualitas infrastruktur wisata, digitalisasi tiket dan retribusi wisata, optimalisasi pajak hotel dan restoran, serta pengembangan paket wisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif. Dengan demikian, sektor pariwisata tidak hanya meningkatkan mobilitas wisatawan, tetapi juga mampu memberikan

⁵⁷ Wirawan and El Hasanah, "Tourism Sector and Regional Own-Source Revenue: A Panel Data Analysis of Six Provinces in Java Island, Indonesia."

⁵⁸ Khairina and Anggraeni, "The Contribution of Tourism Sector to Locally Generated Revenue in Indonesia's Top Priority Tourist Destination."

kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

c. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan *pendekatan Fixed Effect Model*. variabel tenaga kerja (X_3) memiliki nilai koefisien sebesar 166.453.48. nilai t-statistic sebesar 2,2491, dan nilai probabilitas sebesar 0,0268. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha = 0,05$). sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2015–2024. Secara statistik, hasil ini menunjukkan bahwa perubahan jumlah tenaga kerja mampu menjelaskan variasi PAD secara signifikan dalam model penelitian.

Secara ekonomis, nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan tenaga kerja sebesar 1 jiwa akan meningkatkan PAD sebesar Rp166.453.48, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (*ceteris paribus*). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah penduduk yang bekerja, maka semakin tinggi aktivitas ekonomi daerah yang tercipta, baik melalui peningkatan produksi, konsumsi rumah tangga, maupun aktivitas usaha yang pada akhirnya memperluas basis penerimaan daerah melalui pajak daerah, retribusi, serta aktivitas ekonomi formal lainnya.

Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikemukakan oleh Robert Solow. yang menjelaskan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama yang berperan dalam meningkatkan output ekonomi suatu wilayah.⁵⁹ Dalam model pertumbuhan Solow, peningkatan jumlah tenaga kerja akan memperbesar kapasitas produksi, mendorong ekspansi aktivitas ekonomi, dan meningkatkan pendapatan regional, Selain itu, teori pembangunan klasik dari Adam Smith juga menegaskan bahwa produktivitas tenaga kerja dan pembagian kerja (*division of labor*) menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi, Semakin besar penyerapan tenaga kerja, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah ekonomi.⁶⁰

Dalam konteks empiris kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2015–2024, hasil ini cukup relevan dengan struktur ekonomi daerah yang didominasi sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa, dan industri pengolahan skala menengah. Daerah seperti Kota Jambi, Muaro Jambi, Bungo, dan Merangin menunjukkan jumlah tenaga kerja yang relatif tinggi selama periode pengamatan, yang sejalan dengan tingginya aktivitas ekonomi lokal. Peningkatan penyerapan tenaga kerja juga menjadi salah satu indikator pemulihan ekonomi

⁵⁹ Vazquez, McNab, and M, "Fiscal Decentralization and Economic Growth."

⁶⁰ Todaro and Smith, *Economic Development (13th Ed.)*.

pascapandemi Covid-19, terutama pada periode 2021–2024 ketika aktivitas usaha mulai kembali normal. Organisasi International Labour Organization dalam laporan World Employment and Social Outlook 2023 juga menegaskan bahwa peningkatan kesempatan kerja memiliki kontribusi penting terhadap produktivitas dan ketahanan ekonomi wilayah⁶¹.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Razak dkk, yang menemukan bahwa tenaga kerja memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia, terutama pada daerah dengan aktivitas ekonomi produktif yang tinggi. Temuan ini juga konsisten dengan berbagai studi pembangunan daerah di Indonesia yang menunjukkan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja dapat memperluas basis ekonomi lokal dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah⁶².

Namun demikian, beberapa penelitian juga menemukan hasil yang berbeda, Pada beberapa wilayah dengan kualitas tenaga kerja yang rendah, peningkatan jumlah tenaga kerja belum tentu diikuti peningkatan produktivitas ekonomi, Perbedaan hasil tersebut umumnya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia. tingkat pendidikan. keterampilan kerja. serta struktur ekonomi daerah yang berbeda. Dengan kata lain. jumlah tenaga kerja saja tidak selalu cukup untuk mendorong peningkatan penerimaan daerah apabila tidak diikuti oleh produktivitas dan kualitas pekerjaan yang memadai.

Secara kritis, hasil positif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PAD daerah di Provinsi Jambi masih sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi riil masyarakat. Semakin tinggi partisipasi tenaga kerja dalam sektor produktif. maka semakin besar pula potensi penerimaan fiskal daerah. Namun. perlu dicermati bahwa sebagian besar tenaga kerja di beberapa kabupaten masih terkonsentrasi pada sektor primer dan sektor informal. yang nilai tambah fiskalnya relatif lebih rendah dibandingkan sektor industri dan jasa modern.

Dari sisi kebijakan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui program pelatihan vokasi. peningkatan keterampilan berbasis kebutuhan industri. pengembangan UMKM. serta perluasan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu. sinergi antara dunia pendidikan. dunia usaha. dan pemerintah daerah menjadi penting agar peningkatan jumlah tenaga kerja tidak hanya meningkatkan kesempatan kerja. tetapi juga mampu memperkuat basis pajak daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

⁶¹ ILO, "World Employment and Social Outlook: Trends 2023."

⁶² Prasasti, "Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten & Kota Sulawesi Selatan."

d. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan *pendekatan Fixed Effect Model*, variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_4) memiliki nilai koefisien sebesar 4.798.689.65, nilai t-statistic sebesar 3.2882, dan nilai probabilitas sebesar 0,0014, Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha = 0.05$), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2015–2024. Secara statistik, hasil ini menunjukkan bahwa perubahan PDRB mampu menjelaskan variasi PAD secara signifikan dalam model penelitian.

Secara ekonomis, koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan PDRB sebesar Rp1 miliar akan meningkatkan PAD sebesar Rp4.798.689.65, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan (*ceteris paribus*), Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas ekonomi yang tercipta di suatu daerah, maka semakin besar pula potensi penerimaan daerah melalui pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, dan sumber-sumber pendapatan asli lainnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung memperluas basis fiskal pemerintah daerah.

Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Simon Kuznets, yang menjelaskan bahwa pertumbuhan output regional mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi masyarakat.⁶³ Ketika output ekonomi meningkat, maka pendapatan masyarakat, konsumsi, investasi, dan aktivitas bisnis juga meningkat, yang pada akhirnya memperbesar basis perpajakan daerah. Selain itu, hukum Wagner (*Wagner's Law*) yang dikemukakan oleh Adolph Wagner menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh meningkatnya kapasitas fiskal pemerintah melalui ekspansi penerimaan publik. Dalam konteks desentralisasi fiskal. teori Fiscal Federalism dari Richard Musgrave juga menjelaskan bahwa daerah dengan aktivitas ekonomi tinggi cenderung memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat dalam membiayai pembangunan.⁶⁴

Dalam konteks empiris kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2015–2024, hasil ini cukup relevan dengan kondisi perekonomian daerah yang menunjukkan tren pertumbuhan positif pada sebagian besar wilayah. Daerah seperti Kota Jambi, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur memiliki nilai PDRB relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya. Tingginya PDRB pada wilayah tersebut didukung oleh aktivitas perdagangan, industri pengolahan, jasa, perkebunan, dan sektor pertambangan yang berkembang.

⁶³ Will Manley and Shopia Prica, *Smart Urban Regeneration*.

⁶⁴ Musgrave and Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*.

Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut secara langsung menciptakan objek pajak dan retribusi yang lebih luas. sehingga berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Marbun dkk yang menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah di Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa daerah dengan tingkat output ekonomi yang tinggi memiliki kemampuan lebih besar dalam menciptakan penerimaan daerah melalui aktivitas ekonomi formal. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Putri dan Sari, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD pada pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu. penelitian oleh Hidayat dkk menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi regional mampu meningkatkan basis pajak dan memperkuat struktur pendapatan pemerintah daerah.⁶⁵

Di tingkat internasional, laporan World Bank menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi regional merupakan salah satu faktor utama dalam memperkuat subnational fiscal capacity. terutama di negara berkembang.⁶⁶ Sementara itu. *Organisation for Economic Co-operation and Development* juga menegaskan bahwa daerah dengan basis ekonomi produktif cenderung memiliki ketahanan fiskal yang lebih baik dalam menghadapi guncangan ekonomi.⁶⁷

Namun demikian. terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan hasil berbeda. Beberapa studi menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti peningkatan PAD apabila struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor informal atau aktivitas ekonomi yang belum terintegrasi ke dalam sistem perpajakan daerah. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik ekonomi wilayah. efektivitas administrasi perpajakan. kualitas tata kelola fiskal. dan tingkat kepatuhan wajib pajak daerah.

Secara kritis, hasil positif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PAD kabupaten/kota di Provinsi Jambi masih sangat dipengaruhi oleh dinamika aktivitas ekonomi riil daerah. Ketika sektor perdagangan, jasa, industri, pertanian komersial, dan investasi berkembang, maka potensi penerimaan fiskal daerah juga meningkat. Namun, peningkatan PDRB belum tentu optimal meningkatkan PAD apabila sebagian besar pertumbuhan ekonomi berasal dari sektor ekstraktif atau sektor yang kontribusi pajaknya relatif terbatas terhadap pemerintah daerah.

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Jambi perlu terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis sektor produktif. Strategi yang dapat dilakukan antara lain memperkuat investasi daerah, mengembangkan kawasan industri dan perdagangan,

⁶⁵ HANIF, "PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DITINJAU DARI INFRASTRUKTUR DAN KEPADATAN PENDUDUK 33 PROVINSI DI INDONESIA."

⁶⁶ World Bank, *Indonesia Economic Prospects: Strengthening Connectivity and Growth*.

⁶⁷ OECD, "OECD Fiscal Decentralisation Database."

meningkatkan hilirisasi komoditas unggulan, memperluas digitalisasi sistem perpajakan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha. Dengan demikian, peningkatan PDRB tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas fiskal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

6. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, pengembangan kewirausahaan, serta penguatan keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, penciptaan iklim investasi yang kondusif juga perlu diperkuat agar mampu membuka lapangan kerja baru pada sektor-sektor produktif seperti industri pengolahan, perdagangan jasa, dan ekonomi kreatif

Kedua, variabel PDRB terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan penerimaan fiskal daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu mendorong transformasi struktur ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan daerah, hilirisasi komoditas perkebunan dan pertanian, penguatan kawasan industri, serta peningkatan investasi lokal. Kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang memiliki potensi sektor perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan jasa perlu diarahkan pada penguatan rantai nilai (*value chain*) agar menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi.

Ketiga, variabel panjang jalan dalam penelitian ini belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PAD. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi peningkatan penerimaan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengubah orientasi pembangunan infrastruktur dari sekadar kuantitas pembangunan menuju kualitas, konektivitas, dan produktivitas ekonomi. Pembangunan jalan perlu diprioritaskan pada wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi, seperti sentra produksi pertanian, kawasan industri, pusat perdagangan, dan destinasi wisata, sehingga manfaat ekonomi infrastruktur dapat lebih optimal.

Keempat, variabel jumlah wisatawan juga belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PAD. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisata belum sepenuhnya mampu menghasilkan economic spillover terhadap penerimaan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan reorientasi kebijakan pariwisata dari quantity-based tourism menuju quality-based tourism. Strategi yang dapat dilakukan antara lain pengembangan destinasi unggulan, peningkatan kualitas amenities dan aksesibilitas, digitalisasi sistem tiket dan retribusi wisata, penguatan promosi berbasis teknologi digital, serta integrasi sektor pariwisata dengan UMKM, kuliner, ekonomi kreatif, dan jasa akomodasi

Kelima, secara fiskal, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan optimalisasi PAD melalui reformasi administrasi perpajakan daerah, digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data objek pajak, serta penguatan pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan. Penguatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah, khususnya organisasi pengelola pendapatan daerah, menjadi faktor penting agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat terkonversi secara optimal menjadi penerimaan fiskal.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel terhadap 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2015–2024, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama periode 2015–2020 di Provinsi Jambi, PAD, tenaga kerja, dan PDRB menunjukkan tren pertumbuhan positif. PAD meningkat sebesar 23,79%, tenaga kerja meningkat 20,16%, dan PDRB meningkat 19,63%. Sementara itu, infrastruktur jalan mengalami penurunan sebesar 8,97%, dan kunjungan wisatawan mengalami penurunan paling besar yaitu 65,26%, terutama akibat dampak pandemi Covid-19. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah tetap mengalami pertumbuhan meskipun beberapa sektor mengalami tekanan.
2. Secara simultan, variabel infrastruktur jalan, pariwisata, tenaga kerja, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara parsial, tenaga kerja dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan infrastruktur jalan dan pariwisata tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Hasil ini menunjukkan bahwa

peningkatan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja menjadi faktor utama dalam meningkatkan PAD daerah.

Daftar Pustaka

- Baye, A, and M Kreitner. *The Economics of Human Capital in the Knowledge Economy*. Cham: Springer, 2021.
- Becker, Gary S. *Human Capital*. University of Chicago Press, 1993. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226041223.001.0001>.
- BPS. *KetenagaKerjaan Provinsi, 2024*, 2024.
- . “Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi (Miliar Rupiah.” Jambi, 2025.
- . *Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan [Rincian 2022] (Rupiah)*, 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2024.
- . “Statistik-Hotel-Dan-Akomodasi-Lainnya-Provinsi-Jambi-2024,” 2024.
- . “Statistik Daerah Provinsi Jambi 2024,” 2024, 1–80.
- . “STATISTIK INDONESIA 2024,” 2025.
- BPS Provinsi Jambi. “Provinsi Jambi Dalam Angka 2025.” Jambi, 2025.
- Fletcher, John E. “Input-Output Analysis and Tourism Impact Studies.” *Annals of Tourism Research* 16, no. 4 (1989): 514–29. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(89\)90006-6](https://doi.org/10.1016/0160-7383(89)90006-6).
- Gertler, Paul J., Marco Gonzalez-Navarro, Tadeja Gračner, and Alexander D. Rothenberg. “Road Maintenance and Local Economic Development: Evidence from Indonesia’s Highways.” *Journal of Urban Economics* 143 (September 2024): 103687. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2024.103687>.
- Ghozali, I. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Edisi Terbaru. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro., 2021.
- Gujarati, D. N., and Porter. *Basic Econometrics*. New York: McGraw-Hill, 2021.
- Gultom, Rifyal Zuhdi, and Annisa Qadarusman Tini. “Pembangunan Infrastruktur Dalam Islam: Tinjauan Ekonomi Dan Sosial.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (June 29, 2020): 203. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.912>.
- Hadi, Samsul, and Benedictus Raksaka Mahi. “Peran Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Terhadap Pembangunan Pendidikan Daerah Tertinggal Di Indonesia.” *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 9, no. 1 (March 30, 2024): 25–42. <https://doi.org/10.33105/itrev.v9i1.670>.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik "Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Hamidi, Ubaidi S, Dewi Puspita, Tim Penulis Badan, Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Merita Pahlevi, Madya Raharja, et al. “Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal Di Indonesia Editor.” Jakarta, 2022.
- Handari, Wahyu Dwi, and Isnandar. “Indikator Pasar Tenaga Kerja Di Indonesia Berdasarkan Kerangka Key Indicators of the Labour Market (KILM).” *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL* 6, no. 4 (June 27, 2025): 2867–75. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i4.4950>.

- HANIF, ABDUL RAHMAN. "PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DITINJAU DARI INFRASTRUKTUR DAN KEPADATAN PENDUDUK 33 PROVINSI DI INDONESIA." *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018.
- Hanif, Imran, Sally Wallace, and Pilar Gago-de-Santos. "Economic Growth by Means of Fiscal Decentralization: An Empirical Study for Federal Developing Countries." *Sage Open* 10, no. 4 (October 23, 2020). <https://doi.org/10.1177/2158244020968088>.
- Hutauruk, Rapat Piter Sony. "Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Pematangsiantar." *Jurnal Ekuilnomi* 3, no. 1 (May 30, 2021): 24–37. <https://doi.org/10.36985/w8we1x56>.
- ILO. "World Employment and Social Outlook: Trends 2023." Geneva, 2023.
- Jhingan, M. L. *The Economics of Development and Planning*. New Delhi: Vrinda Publications, 2016.
- Kemenkeu. "Portal Data APBD." Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia., May 9, 2024.
- Kemnkeu. "Data APBD Dan Transfer Ke Daerah." Jakarta, 2024.
- Khairina, Najwa, and Leni Anggraeni. "The Contribution of Tourism Sector to Locally Generated Revenue in Indonesia's Top Priority Tourist Destination." *Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 18, no. 1 (March 11, 2023): 48–61. <https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v18i1.2023.pp48-61>.
- Lewis, Blane D. "Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 59, no. 1 (January 2, 2023): 1–28. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga, 2019.
- Mankiw, N. G., D. Romer, and D. N. Weil. "A Contribution to the Empirics of Economic Growth." *The Quarterly Journal of Economics* 107, no. 2 (May 1, 1992): 407–37. <https://doi.org/10.2307/2118477>.
- Mankiw, N. Gregory. *Macroeconomics*. Edisi 11. New York: Worth Publishers, 2021.
- Mardiasmo. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Terbaru. Vol. Penerbit Andi. Yogyakarta: Penerbit Andi, ISBN: 978-979-29-6317-7., 2018.
- Musgrave, Richard, and P. B Musgrave. *Public Finance in Theory and Practice*. New York: Tata McGraw-Hill Education., 2017.
- OECD. "OECD Fiscal Decentralisation Database." Paris, 2022.
- Pendit, Nyoman. *Ilmu Pariwisata : Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT Pradnya Paramiata, 2002.
- Pineda-Mora, Daniel, Jeiry Toribio-Jiménez, Teresa Leal-Ascencio Ma, Ana Laura Juárez-López, Justiniano González-González, Jesús Carlos Ruvalcaba-Ledezma, Ramón Alberto Batista-García, and Paul Alexander Arp. "Emerging Water Quality Issues along Rio de La Sabana, Mexico." *Journal of Water Resource and Protection* 10, no. 07 (2018): 621–36. <https://doi.org/10.4236/jwarp.2018.107035>.
- Prasasti, Dian. "Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten & Kota Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE* 6, no. 3 (August 31, 2022): 478–90. <https://doi.org/10.22219/jie.v6i3.22280>.
- Qian, Yingyi, and Gérard Roland. "Federalism and the Soft Budget Constraint." *SSRN*

- Electronic Journal*, 1999. <https://doi.org/10.2139/ssrn.149988>.
- Raliyah, Siti. "Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Provinsi Jambi." *Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Jambi*. Vol. 4. Jambi, 2025.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2014.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.*, 2004.
- Sarundajang, S. H. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Song, H., and S. F Witt. *Tourism Economics and Policy (2nd Ed.)*. Bristol: Channel View Publications, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Todaro, M. P., and S. C Smith. *Economic Development (13th Ed.)*. Pearson Education., 2020.
- Vazquez, Martinez, Jorge McNab, and Robert M. "Fiscal Decentralization and Economic Growth." *World Development*, Elsevier 31(9) (September 1, 2003): 1597–1616.
- Will Manley, and Shopia Prica. *Smart Urban Regeneration*. Edited by Simon Huston. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2017. |: Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315677521>.
- Wirawan, Hanan Afif, and Lak lak Nazhat El Hasanah. "Tourism Sector and Regional Own-Source Revenue: A Panel Data Analysis of Six Provinces in Java Island, Indonesia." *Journal of Economics Research and Policy Studies* 5, no. 2 (July 30, 2025): 355–66. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i2.2171>.
- World Bank. *Indonesia Economic Prospects: Strengthening Connectivity and Growth*. Washington, DC: World Bank, 2023.